

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Umum Akuntansi Keuangan

2.1.1 Pengertian Siklus Akuntansi

Biswan dan Mahruz (2020) menjelaskan bahwa akuntansi keuangan adalah sebuah proses akuntansi yang dimulai dengan mengidentifikasi transaksi sampai dengan dikomunikasikan dalam bentuk laporan keuangan kepada pengguna eksternal. Sejalan dengan hal itu, Kieso et al (2015) mengatakan bahwa akuntansi keuangan adalah proses 1) mengidentifikasi transaksi atau peristiwa ekonomi yang terjadi, 2) mencatat, mengklasifikasikan, dan menyimpulkan transaksi yang terjadi, dan 3) mengkomunikasikan kegiatan ekonomi yang terjadi pada suatu organisasi dalam bentuk laporan keuangan serta menganalisis dan menginterpretasikannya kepada pengguna yang berkepentingan.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi keuangan adalah proses akuntansi yang terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu identifikasi transaksi, pencatatan transaksi, dan mengkomunikasikan peristiwa tersebut dalam bentuk laporan keuangan.

2.1.2 Tahapan Siklus Akuntansi

Kieso et al (2015) menjelaskan bahwa siklus akuntansi secara berurutan mencakup sebagai berikut.

- 1) Identifikasi transaksi
- 2) Penjurnalan transaksi
- 3) Posting jurnal ke buku besar
- 4) Penyusunan jurnal penyesuaian
- 5) Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian
- 6) Penyusunan laporan keuangan
- 7) Pembuatan jurnal penutup
- 8) Penyusunan neraca saldo setelah penutupan
- 9) Pembuatan jurnal pembalik

2.2 Pengakuan dan Pengukuran Awal Biaya Persediaan

2.2.1 Pengertian Persediaan

Persediaan secara umum diartikan sebagai barang yang akan dijual oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga persediaan memiliki peran yang penting dalam keberlangsungan usaha perusahaan. Hal ini karena tanpa adanya persediaan, perusahaan tidak akan dapat menjalankan aktivitasnya dengan normal atau dengan kata lain perusahaan akan mengalami gangguan karena perusahaan tidak dapat memenuhi keinginan pelanggannya.

Persediaan merupakan aset yang sangat penting bagi perusahaan karena adanya persediaan dapat mempermudah dan melancarkan kegiatan bisnis sebuah perusahaan. Selain itu, persediaan juga merupakan salah satu elemen laporan

keuangan yang masuk ke dalam pos aset lancar sehingga mudah untuk diubah menjadi kas dalam waktu yang cepat. Dan juga bagi Sebagian besar perusahaan, persediaan merupakan aset yang memiliki perputaran paling besar dalam kegiatan operasional perusahaan. Oleh sebab itu, khususnya perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur banyak melakukan investasi pada aset lancar persediaan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 14 menjelaskan bahwa persediaan adalah aset: a) yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, b) aset dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau c) aset dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Menurut (Kieso et al., 2018), Persediaan adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan, atau barang yang akan digunakan untuk memproduksi barang yang akan dijual. Sehingga dalam pengukurannya, persediaan membutuhkan perhatian yang cermat.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam (Parlindungan & Rosandi, 2018), persediaan bagi perusahaan dagang adalah barang yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali, sedangkan bagi perusahaan manufaktur persediaan didefinisikan sebagai barang yang masih dalam proses untuk diolah menjadi barang jadi yang kemudian akan dijual kepada pelanggan. Persediaan yang dimaksud oleh perusahaan manufaktur termasuk bahan mentah untuk membuat barang produksi maupun barang dalam proses yang sedang diproduksi untuk menghasilkan barang jadi. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa persediaan adalah salah satu aset lancar perusahaan yang dimiliki untuk dijual atau digunakan

untuk proses produksi perusahaan dengan tujuan dijual kembali guna mendapatkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional perusahaan.

2.2.2 Klasifikasi Persediaan

Setiap perusahaan memiliki jenis persediaan yang berbeda dengan perusahaan lainnya. Hal ini bergantung pada bidang yang ditekuni oleh perusahaan atau dengan kata lain hal ini bergantung pada kegiatan bisnis perusahaan yang bersangkutan. Umumnya persediaan dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Persediaan barang dagang

Menurut Biswan & Mahruz (2020:131), pada perusahaan dagang, *inventory* atau *merchandise inventory* adalah persediaan yang biasanya digunakan untuk barang yang dijual oleh perusahaan dagang. Persediaan yang dibeli dari pemasok langsung dijual kepada pelanggan tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Dalam pencatatan persediaan pada laporan keuangan perusahaan dagang, hanya terdapat satu akun persediaan, yaitu persediaan Barang Dagang (*Merchandise Inventory*).

2) Persediaan barang manufaktur

Bahri (2016:13) menjelaskan bahwa perusahaan manufaktur (*manufacturing business*) memproduksi sendiri barang yang akan dijual kepada pelanggan dengan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi terlebih dahulu. Menurut Biswan & Mahruz (2020:131), perusahaan manufaktur memiliki tiga jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished good*). *Raw material* adalah bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan namun belum digunakan dalam proses produksi. *Work in process* adalah bahan baku yang telah diolah oleh perusahaan

namun belum selesai 100% atau masih belum menjadi barang jadi seutuhnya sehingga persediaan ini masih memerlukan proses lebih lanjut. Sedangkan *finished good* adalah barang jadi yang telah siap untuk dijual kepada pelanggan.

2.2.3 Biaya Persediaan

Dalam biaya perolehan persediaan, terdapat tiga klasifikasi biaya yang harus diperhatikan. Klasifikasi biaya terkait perolehan persediaan tersebut yaitu: biaya pembelian; biaya konversi; dan biaya lainnya (Martani et al., 2016). Menurut PSAK 14 paragraf 10, biaya yang dimasukkan sebagai komponen persediaan atau biaya persediaan terdiri dari a) seluruh biaya pembelian, b) biaya konversi, dan c) biaya lain-lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini.

1) Biaya Pembelian

Biaya pembelian persediaan adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas untuk membeli barang persediaan. Biaya ini meliputi harga beli barang, bea impor dan pungutan bea cukai lainnya, pajak lainnya kecuali yang dapat ditagihkan kembali kepada otoritas jasa pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya dimana biaya ini secara langsung dapat dialokasikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Dalam hal terdapat diskon dagang dan rabat, maka biaya ini akan dikurangkan dalam perhitungan biaya pembelian barang persediaan (Biswan & Mahruz, 2020).

2) Biaya Konversi

Biaya konversi adalah biaya yang timbul karena mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi (Martani et al., 2016).

Biaya konversi biasanya terdiri dari biaya tenaga kerja langsung (*direct labor*) dan biaya pabrikasi (*Factory overhead/FOH*) (Biswan & Mahruz, 2020).

3) Biaya lain-lain

Biaya lain-lain adalah biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat itu yang siap untuk dijual (Biswan & Mahruz, 2020). Biaya perolehan persediaan yang masuk ke dalam biaya lain-lain seperti biaya penelitian dan pengembangan (*research & development*), biaya administrasi dan penjualan, biaya pemborosan, dan biaya penyimpanan. Dalam pencatatannya, biaya ini tidak akan diakui sebagai biaya penambah perolehan persediaan, namun biaya ini akan diakui oleh entitas akan diakui sebagai beban tahun berjalan (Martani et al., 2016).

Pada perusahaan dagang, Biswan & Mahruz (2020:134) mengatakan bahwa biaya persediaan meliputi : 1) harga pembelian (*purchase*), 2) pajak impor dan pajak lain (*taxes*), 3) biaya transportasi (*freight in*), dan 4) biaya lain yang berhubungan secara langsung dengan perolehan barang persediaan. Dalam penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa biaya yang termasuk ke dalam biaya perolehan persediaan adalah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi barang persediaan termasuk didalamnya biaya yang terjadi untuk membawa persediaan sampai siap untuk dijual oleh perusahaan.

Adapun biaya yang dibayarkan oleh perusahaan tidak secara langsung berhubungan dengan akuisisi barang persediaan, biaya tersebut tidak dimasukkan ke dalam biaya persediaan. Biaya ini biasanya disebut sebagai *period cost* atau biaya yang dikeluarkan perusahaan selain dari harga pokok penjualan. Contoh dari

biaya ini adalah beban penjualan dan beban umum dan administrasi (Biswan & Mahruz, 2020).

2.2.4 Barang-barang yang termasuk dalam persediaan

Menurut Biswan & Mahruz (2020:132) klasifikasi barang yang masuk ke dalam persediaan perusahaan termasuk 1) barang persediaan yang ada pada perusahaan dan merupakan milik perusahaan tersebut, 2) barang persediaan yang ada pada perusahaan namun bukan milik perusahaan tersebut, dan 3) barang milik perusahaan, namun tidak ada pada perusahaan tersebut. Prinsipnya perusahaan baru boleh mengakui dan mencatat barang sebagai persediaan ketika perusahaan telah memperoleh hak kepemilikan atas barang tersebut secara legal dan memiliki kontrol atas barang tersebut secara penuh .

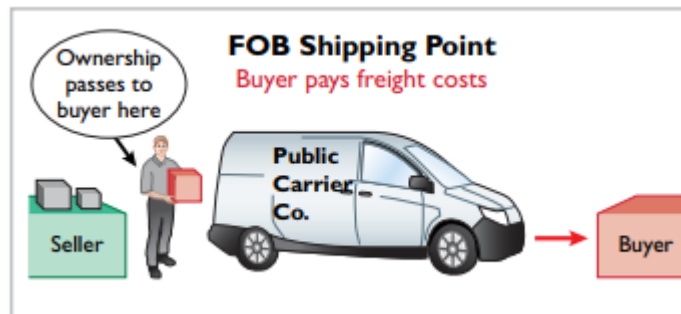
Dalam membeli dan/atau memperoleh barang persediaan yang dilakukan oleh entitas, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian pada saat penentuan kepemilikan barang bersangkutan. Perhatian ini ditujukan agar entitas tidak keliru pada saat melakukan pencatatan dan perhitungan atas barang yang ada di tangan entitas pada saat pelaporan laporan keuangan entitas bersangkutan.

1) Barang dalam perjalanan (*Good in Transit*)

Terdapat dua syarat dalam penentuan kepemilikan atas barang dalam perjalanan, yaitu *FOB destination point* dan *FOB shipping point*. Syarat ini ditentukan untuk menentukan biaya pengiriman barang persediaan akan dibayarkan oleh pihak penjual atau pembeli.

a. FOB Shipping Point

Gambar II.1 Ilustrasi FOB Shipping Point



Sumber: Kieso et al. (2015:225)

Berdasarkan ilustrasi diatas, dapat dilihat bahwa dalam syarat pengiriman barang dengan *FOB Shipping Point*, saat pihak penjual menyerahkan barang ke kurir, maka saat itu barang persediaan sudah bukan milik penjual lagi, melainkan sudah berpindah kepemilikan ke tangan pembeli. Pada saat ini, penjual mengakui pencatatan atas barang yang dijual. Karena kepemilikan barang berpindah saat penjual menyerahkan barang bersangkutan ke kurir, maka atas biaya pengangkutan atau biaya pengiriman akan dilakukan oleh pembeli.

Hal ini sejalan dengan pendapat Kieso et al. (2015:225) yang mengatakan bahwa penjual meletakkan barang persediaan secara gratis kepada kurir, dan pembeli yang akan membayar biaya tersebut. Atas hal ini, penjual tidak mengakui beban operasional atas biaya pengangkutan barang karena bukan penjual yang membayarnya. Bagi pembeli biaya pengangkutan atau biaya pengiriman ini akan menjadi penambah biaya perolehan persediaan.

b. FOB Destination Point

Gambar II.2 Ilustrasi FOB Destination Point



Sumber : Kieso et al. (2015:225)

Berdasarkan ilustrasi diatas, dapat dilihat bahwa dalam syarat pengiriman barang dengan *FOB Destination Point*, saat penjual menyerahkan barang ke kurir, barang masih merupakan milik penjual atau dengan kata lain kepemilikan barang belum berpindah. kepemilikan atas barang baru berpindah saat barang telah diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Oleh karena itu, saat penjual mengeluarkan barang dari gudang dan diserahkan ke kurir, penjual tidak boleh mengakui penjualan atas barang tersebut karena barang tersebut masih milik penjual sampai barang tersebut diterima oleh pembeli. Penjual mengakui penjualan atas barang tersebut sesaat setelah penjual menyerahkan barang kepada pembeli.

Hal ini sejalan dengan pendapat Kieso et al. (2015:225) yang mengatakan bahwa biaya pengangkutan atau biaya pengiriman barang diakui oleh penjual sebagai beban operasional perusahaan. Sehingga dalam pengiriman barang dengan syarat *FOB Destination Point*, biaya perolehan persediaan yang diakui oleh pembeli hanya sebesar biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang persediaan bersangkutan saja.

2) Barang konsinyasi

Kieso et al. (2015:281) mengatakan bahwa barang konsinyasi adalah barang yang dimiliki oleh pihak lain yang dititipkan kepada perusahaan dan perusahaan menjual barang tersebut kepada pelanggan dengan mendapatkan bayaran/komisi atas barang yang telah berhasil dijual, tetapi tanpa mengambil kepemilikan barang tersebut. Mahrus & Biswan (2020:154) menjelaskan bahwa barang konsinyasi adalah barang yang dititipkan oleh pihak lain kepada perusahaan untuk dijual kepada konsumen. Pihak yang menitipkan barang disebut *consignor* dan pihak yang dititipkan barang disebut *consignee*. *Consignor* akan mengakui pendapatan atas barang konsinyasi pada saat *consignee* melaporkan dan menyerahkan hasil penjualan barang, sedangkan *consignee* akan mengakui pendapatan saat memperoleh komisi dari *consignor*.

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa barang konsinyasi adalah barang yang dititipkan pihak lain kepada perusahaan dengan harapan perusahaan akan mendapatkan bayaran dari menjual barang tersebut kepada pembeli. Meskipun fisik barang berada pada perusahaan, namun hak kepemilikan barang tetap berada di pihak yang menitipkan barang sampai barang tersebut terjual. Sehingga dalam laporan keuangan, perusahaan tidak boleh mengakui barang konsinyasi sebagai persediaan perusahaan.

3) Barang yang dijual untuk dibeli kembali (*sales with repurchase*)

Menurut Mahrus & Biswan (2020:152), barang yang dijual untuk dibeli kembali atau yang dikenal dengan sebutan *repurchase agreement* adalah suatu perjanjian jual beli dimana penjual memiliki hak atau wajib membeli kembali

barang yang telah dijual kepada pembeli dengan jangka waktu dan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal harga beli saat dibeli kembali lebih besar daripada harga jual awal, maka transaksi ini merupakan transaksi pembiayaan. Barang yang dijual untuk dibeli kembali ini hak kepemilikannya diakui oleh penjual (yang akan membeli kembali).

4) Barang yang dijual dengan hak pengembalian (*sales with rights of return*)

Pada barang yang dijual dengan hak pengembalian, maka terdapat dua status dalam mengakui hak kepemilikannya, yaitu hak kepemilikan berada pada penjual apabila tingkat pengembalian tidak dapat diperkirakan, sedangkan hak kepemilikan berada pada pembeli apabila tingkat pengembalian barang dapat diperkirakan (Biswan & Mahruz, 2020).

Tabel II.1 Aturan umum Pengakuan Persediaan

Jenis transaksi	Status persediaan	Keterangan
<i>Good in transit (FOB Shipping Point)</i> → biaya angkut barang dibayar oleh pembeli	Milik pembeli	Saat persediaan telah diserahkan kepada kurir.
	Milik penjual	Selama persediaan belum diserahkan kepada kurir (persediaan masih di gudang penjual)
<i>Good in transit (FOB Destination Point)</i> → biaya angkut barang dibayar oleh penjual	Milik pembeli	Saat persediaan telah diserahkan kepada pembeli atau telah sampai di gudang pembeli
	Milik penjual	Saat persediaan belum diserahkan kepada pembeli atau masih dalam perjalanan dan belum sampai di gudang pembeli

Barang konsinyasi	Milik konsinyor	Selama barang persediaan yang dititipkan belum terjual
<i>Sales with repurchase</i>	Milik penjual (pembeli kembali)	Penjual akan mencatat persediaan dan kewajiban yang terkait
<i>Sales with rights of return</i>	Milik penjual	Ketika tingkat pengembalian barang tidak dapat diperkirakan
	Milik pembeli	Ketika tingkat pengembalian barang dapat diperkirakan

Sumber : Biswan & Mahruz (2020:132)

2.3 Sistem Pencatatan Persediaan

Menurut Siswati (2016:76), penilaian persediaan mempunyai pengaruh langsung terhadap hasil usaha dan posisi keuangan suatu perusahaan. Umumnya persediaan diperhitungkan sebesar harga pembelian atau harga perolehan dengan memperhitungkan seluruh biaya untuk memperoleh nilai wajarnya. Dengan kata lain, persediaan yang ada pada perusahaan sesuai jumlahnya dengan yang diperhitungkan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada nilai pembelian persediaan tersebut yang telah ditambah dengan biaya lain terkait sampai persediaan siap untuk dijual oleh entitas.

Dalam sistem penilaian persediaan, entitas dapat menggunakan metode fisik (metode periodik) dan metode perpetual. Untuk mencatat jumlah unit persediaan, entitas dapat menggunakan metode perpetual ataupun metode periodik. Sedangkan untuk menentukan nilai persediaan, dihitung dari jumlah unit yang dikalikan dengan harga beli per unit. Untuk menentukan harga per unit barang, berdasarkan

asumsi arus biaya persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan metode FIFO dan metode harga perolehan rata-rata (*Weighted Average*).

2.3.1 Metode Pencatatan Persediaan

Menurut Kieso et al. (2015:221) Perusahaan biasanya menggunakan dua sistem untuk pencatatan akun persediaan, yaitu sistem persediaan perpetual atau sistem persediaan periodik.

2.3.1.1 Sistem Perpetual

Sistem pencatatan perpetual adalah sistem pencatatan yang dilakukan atas transaksi persediaan yang dilaksanakan setiap terdapat barang masuk dan barang yang keluar dari gudang perusahaan (Sembiring, 2019). Dalam sistem pencatatan persediaan perpetual, perusahaan mencatat biaya untuk setiap pembelian dan penjualan persediaan secara rinci (Kieso et al., 2018). Pada sistem perpetual ini, semua pencatatan dicatat secara berkelanjutan untuk setiap item persediaan. Dalam sistem pencatatan persediaan menggunakan metode ini, perusahaan menentukan Harga Pokok Penjualan (HPP) barang yang dijual setiap kali penjualan terjadi.

2.3.1.2 Sistem Periodik

Menurut Martani (2012:253) dalam (Sembiring, 2019), sistem pencatatan persediaan periodik adalah kuantitas persediaan ditangan ditentukan secara periodik atau dilakukan secara berkala. Dalam sistem pencatatan ini, semua pembelian persediaan selama periode akuntansi akan didebet pada akun pembelian. Pada sistem pencatatan persediaan secara periodik, perusahaan tidak melakukan pencatatan secara mendetail atas persediaan yang dimiliki selama periode berjalan.

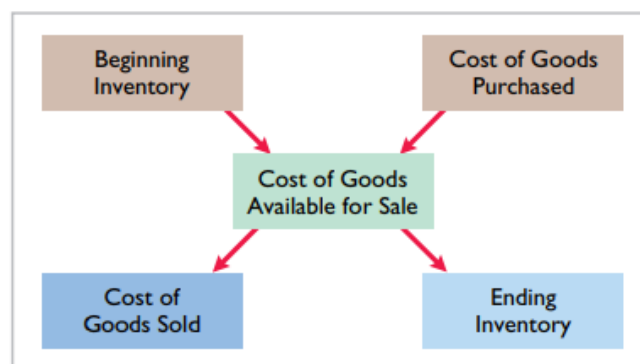
Dalam sistem pencatatan ini, perusahaan hanya akan menentukan harga pokok penjualan pada setiap akhir periode pelaporan akuntansi. Pada saat inilah perusahaan akan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) atas barang persediaan yang masih ada di tangan (Kieso et al., 2015).

Stock opname menurut Sembiring (2019:71) adalah kegiatan perhitungan fisik yang dilakukan oleh perusahaan terhadap persediaan yang ada di gudang. *Stock opname* dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keakuratan catatan pembukuan perusahaan terhadap akun persediaan yang ada di laporan keuangan. Hasil perhitungan *stock opname* kemudian akan dibandingkan dengan saldo akun persediaan yang dicatat pada pembukuan perusahaan.

Sistem pencatatan persediaan secara periodik umumnya digunakan oleh perusahaan dagang yang menjual barang dengan jumlah barang yang dijual banyak dan dengan harga yang relatif murah, seperti supermarket.

2.3.2 Metode Penilaian Persediaan

Gambar II.3 Aliran Biaya Persediaan



Sumber : diambil dari Kieso et al. (2015)

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa:

Gambar II.4 Menentukan Nilai Persediaan

$$\begin{aligned} \text{Beginning inventory} + \text{cost of goods purchased} &= \text{Cost of goods available for sale} \\ \text{Cost of goods available for sale} &= \text{Cost of goods sold} + \text{Ending inventory} \\ \text{Beginning inventory} + \text{cost of goods purchased} &= \text{Cost of goods sold} + \text{ending inventory} \end{aligned}$$

Sumber: Diolah oleh penulis

2.4 Arus Biaya Persediaan

Biswan & Mahruz (2020:138) mengatakan bahwa secara garis besar ada empat alternatif yang dapat dipilih oleh perusahaan terkait dengan asumsi arus biaya, yaitu: 1) metode identifikasi khusus, 2) metode biaya rata-rata, 3) metode masuk pertama keluar pertama (FIFO), dan 4 metode masuk terakhir keluar pertama (LIFO). Untuk metode biaya rata-rata (*average cost method*) dibagi menjadi dua, yaitu metode rata-rata tertimbang (*weighted average method*) dan metode rata-rata bergerak (*moving average method*).

Meskipun secara garis besar terdapat empat alternatif yang dapat dipilih oleh perusahaan yang selanjutnya dalam PSAK 14 yang disebut rumus biaya. PSAK 14 menyatakan bahwa hanya tiga metode yang diperbolehkan, yaitu 1) metode identifikasi khusus (*specific identification method*), 2) metode masuk pertama keluar pertama (*First In First Out*), dan 3) metode rata-rata tertimbang (*weighted average method*). PSAK 14 juga menjelaskan bahwa perusahaan akan menggunakan rumus biaya yang sama untuk seluruh persediaan yang memiliki kegunaan dan sifat yang sama. Sedangkan untuk persediaan yang memiliki

kegunaan dan sifat yang berbeda, maka diperkenankan untuk menggunakan rumus biaya yang berbeda.

2.4.1 Metode Identifikasi khusus

PSAK 14 paragraf 24 menyebutkan bahwa identifikasi khusus biaya artinya adalah biaya-biaya tertentu diatribusikan ke unit persediaan tertentu yang telah diidentifikasi. Metode ini merupakan perlakuan yang sesuai bagi unit yang dipisahkan untuk proyek tertentu, baik yang dibeli maupun yang dihasilkan. Namun, metode ini tidak sesuai saat terdapat banyak unit persediaan yang dapat menggantikan satu sama lain.

Menurut Biswan & Mahruz (2020:138) dalam metode ini, perusahaan harus mengidentifikasikan barang persediaan yang dijual secara spesifik sehingga dapat diketahui biaya untuk setiap jenis persediaan pada saldo akhir barang persediaan. Metode identifikasi khusus adalah metode yang paling ideal karena metode ini memenuhi prinsip *matching cost against revenue* dan metode ini cocok untuk diterapkan pada perusahaan dengan persediaan sedikit namun bernilai tinggi dan dapat dibedakan antara satu barang dengan barang lainnya (Martani et al., 2016). Contoh dari barang persediaan ini adalah mobil.

2.4.2 Metode First-In First-Out/FIFO

Menurut Biswan & Mahruz (2020:140), metode *First-in first-out* (FIFO) merupakan metode yang paling logis dan realistis untuk digunakan pada saat perusahaan tidak dapat menerapkan metode identifikasi khusus. Metode FIFO relatif lebih konsisten dengan arus fisik persediaan, khususnya pada perusahaan dengan perputaran persediaan yang tinggi. Kelebihan metode ini yaitu perusahaan

dapat menyajikan nilai persediaannya pada laporan posisi keuangan secara relevan, hal ini disebabkan oleh nilai persediaan yang disajikan sesuai dengan harga terkini.

Berdasarkan PSAK 14, rumus FIFO mengasumsikan bahwa unit persediaan yang dibeli pertama kali akan dijual atau digunakan terlebih dahulu sehingga unit yang ada dalam persediaan akhir adalah unit yang dibeli atau diproduksi terakhir kali.

2.4.3 Metode Rata-rata

Metode rata-rata adalah penentuan biaya barang berdasarkan biaya rata-rata semua barang yang sejenis yang tersedia selama satu periode akuntansi. Metode ini bersifat objektif dan sederhana untuk diterapkan dalam menentukan biaya persediaan.

2.5 Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

Berdasarkan PSAK 14, perusahaan wajib menyajikan persediaan yang masih dimilikinya dalam laporan posisi keuangan pada pos aset lancar. Untuk persediaan yang telah terjual kepada pelanggan, perusahaan akan menyajikannya dalam laporan laba rugi dengan akun beban pokok penjualan yang nantinya akan dijadikan sebagai pengurang bagi perusahaan untuk mendapatkan laba kotor perusahaan sebelum dikurangi dengan beban-beban lain yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Persediaan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi neto.

PSAK 14 menyatakan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan.
2. Total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas.
3. Jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.
4. Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan.
5. Jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan.
6. Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan.
7. Keadaan atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan.
8. Jumlah tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan liabilitas.

Berdasarkan PSAK 14, dalam laporan keuangan, klasifikasi persediaan yang biasa digunakan oleh perusahaan adalah barang dagang, perlengkapan produksi, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Sedangkan klasifikasi persediaan bagi entitas jasa biasanya disebut pekerjaan dalam proses.